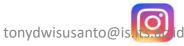


NARASUMBER

Tony Dwi Susanto, Ph.D. (ITIL, COBIT, TOGAF)

- Staf ahli KemenPAN-RB (2019): Tim Evaluator SPBE, Perumus Perangkat Evaluasi SPBE 2021 & Evaluator Layanan Publik Online Staf ahli Kemenkominfo (2019): Tim Perumus Kebijakan Platform Digital
 Staf Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2016): : Tim Perumus Peraturan Menteri Tata Kelola Data Pendidikan
- S3 Computer Science, topik: e-Government & Technology Adoption the Flinders University of South Australia, Beasiswa ALA
- Chapter President Association of Information Systems Indonesia (AISINDO)
- Koordinator Peneliti Smart City ITS (Intitut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya)
 Kepala Peneliti e-Government & IT Governance Research Group ITS
 Kaprodi Program Pascasarjana Departemen Sistem Informasi ITS
- Konsultan e-Government & Smart City: Pemkot Surabaya, Pemkot Kediri, Pemkab Kediri, Pemkab Bojonegoro, Pemkot Madiun, Pemkab Madiun, Pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Pemkot Batu, Pemkot Balikpapan, Pemkab Trenggalek, Nganjuk, Pemkab Gresik, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Salatiga, Banggai Laut, Kab. Sabu Raijua NTT, Northern Territory Government Australia (2011), South Australia (2011-2012)
- Founder & CEO PT Tatacipta Teknologi Indonesia
- Email : tonydwisusanto@is.its.ac.id
- Phone/WA: 0812 1776 2280











Definisi Spile?

(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

"Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)* untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE".

(Perpres 95/2018)

*TIK: termasuk Internet, jaringan komputer, PC, telepon, SMS, social media, Youtube, HT, fax, dll



G2G G2E

Layanan Administrasi Pemerintah (operasional internal & antar)

G2C G2B



MENGAPA SPBE Wajib?

KEPATUHAN PERATURAN:

- 1) Perpres 95/2018 tentang SPBE
- Permenpan 59/2020 tentang
 Pemantauan & Evaluasi SPBE
 ← Indeks SPBE Kemenpan (setiap tahun)
- 3) Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia
- 4) Permenpan 19/2018 tentang Peta Proses Bisnis Permenpan 35/2012 tentang SOP
- 5) Peraturan BSSN 10/2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
- 6) Permendagri 70/2019 tentang
 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
 Permendagri 90/2019 tentang
 Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur
 Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
- 7) BPK: Audit Kinerja SPBE (setiap tahun)

MANFAAT nyata:

- ✓ EFISIENSI (waktu, biaya, energi)
- ✓ MUDAH & FLEKSIBEL

 (Kapan saja 24/7, di mana saja)
- ✓ DATA Terdokumentasi, Terukur, Terintegrasi
 - → Efektif untuk Kontrol & Mengambil keputusan
- ✓ Membentuk sistem & budaya

 Good Governance Government

 (efisien, efektif, responsif, terbuka & transparan, akuntabel, adil, & keterlibatan masyarakat)



Fungsi Perpres 95/2018 & Permenpan-RB 59/2020?

1. Panduan



2. Motivasi (Pain Poin & Reward)



3. Pengukuran & Evaluasi





Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

Aspek SPBE Target Aspek SPBE Indeks Kebijakan Tata Kelola Layanan Publik Kebijakan Layanan Layanan Adpem Kelembagaan

Strategi dan Perencanaan

TIK

Nama Instansi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

K/L/D :Kabupaten
Daerah :Jawa Timur

Indeks SPBE : 2.64
Predikat SPBE : Baik

Domain Kebijakan SPBE : 1.71			
➡ Kebijakan Tata Kelola SPBE	:1.29		
➡ Kebijakan Layanan SPBE	:2.00		
Domain Tata Kelola	: 2.14		
→ Kelembagaan	:2.00		
➡ Strategi dan Perencanaan	:3.00		
⇒ TIK	: 1.67		

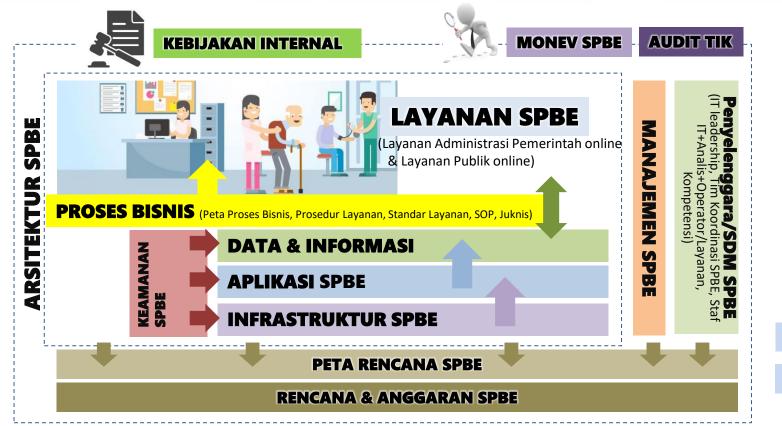
Domain Layanan SPBE : 3.18 → Administrasi Pemerintahan : 3.29

⇒ Pelayanan Publik :3.00

14 Komponen SPBE

BUKAN Hanya Aplikasi & Infrastruktur IT!

BUKAN Hanya Urusan Dinkominfo! (tetapi Semua OPD)





(Ketua: Kepala Daerah, Koordinator: Sekda)



(Dinkominfo perlu dilibatkan)

Dinkominfo

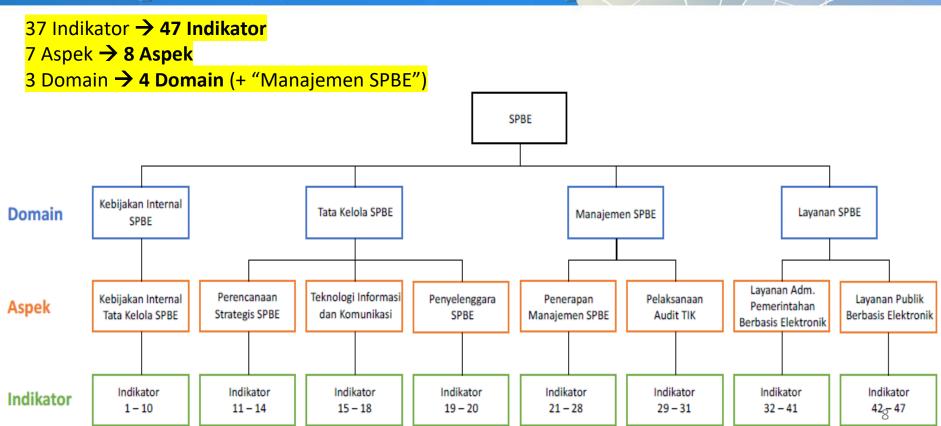
OPD

OPD

OPD

OPD

Permenpan 5/2018 -> Permenpan 59/2020



Predikat & Target SPBE Pemkab Tulungagung 2021

Tabel 13 Predikat Penilaian SPBE

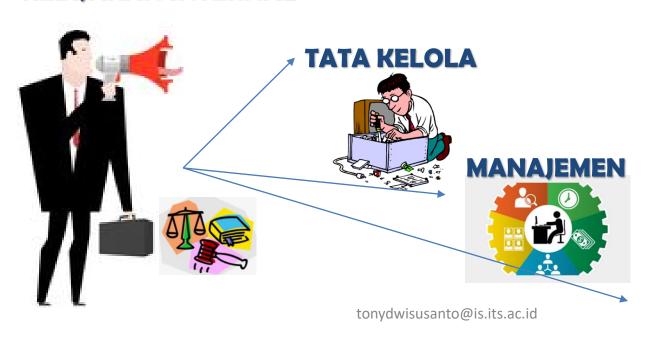
No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

2,64 (Baik) \rightarrow 3,20 (Baik)

I. KEBIJAKAN INTERNAL

"NYURUHnya Benar" KEBIJAKAN INTERNAL

"NGERJAKANnya Benar"





Domain 1: Kebijakan SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE		
Aspek 1 - Kebi	Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		
Indikator 1	tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Indikator 2	tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Indikator 3	tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data		
Indikator 4	tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE		
Indikator 5	tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data		
Indikator 6	tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Indikator 7	tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Indikator 8	tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi		
Indikator 9	tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi		
Indikator 10	tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		



PIC: Bagian HUKUM & Sekretaris OPD

Indikator 1 s/d 10

- ✓ Buat Perwali SPBE selengkap mungkin min. mengatur 10 indikator hingga tahapan integrasi pemerintah provinsi & pusat, jika mungkin Evaluasi & terbitkan Hasil Evaluasi
- Pastikan semua komponen SPBE memiliki payung hukum, jika dibutuhkan terbitkan turunan Kebijakan Internal Perwali SPBE (SK Walikota, SK Sekda hingga Surat Edaran)

II. TATA KELOLA SPBE

Perencanaan Strategis

- 1. Arsitektur SPBE
- 2. Peta Rencana SPBE (termasuk keselarasan Peta Rencana SPBE Renja RKA)
- 3. Inovasi PROSES BISNIS

Teknologi Informasi & Komunikasi

- Proses Pembangunan Aplikasi
- 2. Pusat Data
- 3. Jaringan Intra Pemerintah
- 4. Sistem Penghubung Layanan

Penyelenggara SPBE

- 1. Tim Koordinasi SPBE
- Kolaborasi saatImplementasi SPBE

Domain 2: Tata Kelola SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Tata Kelola SPBE		
Aspek 2 - Pere	ncanaan Strategis SPBE		
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE		
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE		
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi			
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE		
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data		
Indikator 17	tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Indikator 18	tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE			
Indikator 19	tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Indikator 20	tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE		



- 11. Pastikan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup 6 Domain Arsitektur & Referensinya & Direview tiap tahun (*diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional bila telah ada)
- 12. Pastikan dokumen Peta Rencana SPBE telah mencakup 7 peta rencana: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK DAN diacu oleh RENJA & RKA terkait komponen SPBE serta Di EVALUASI & ditindak-lanjuti rutin
- 13. RKA dievaluasi & disetujui TAPD (di dalamnya terdapat Bappeko/da & Dinkominfo) dan Di EVALUASI & ditindak-lanjuti rutin
- 14. Buat PETA PROSES BISNIS Semua OPD & SOP untuk semua Layanan Publik & Administrasi Operasional Internal, Lakukan PERBAIKAN/INOVASI Proses Bisnis & Wujudkan dalam bentuk APLIKASI, serta Evaluasi & Tindak-lanjuti rutin

Arsitektur SPBE





7 Buku (berisi **11 analisis kelompok komponen**)

- + Peta Rencana SPBE sebanyak OPD
- + Draft Perwali/Perbup SPBE Pemda



Buku 1: Kondisi Eksisting & Permasalahan SPBE,
Kondisi SPBE yang ingin dituju, & Gap Analysis

Buku 2: Arsitektur Layanan SPBE
Arsitektur Proses Bisnis
Arsitektur Data dan informasi

Buku 3: Arsitektur Aplikasi SPBE.

Buku 4: Arsitektur Infrastruktur SPBE;

Buku 5: Arsitektur **Keamanan SPBE**;

Buku 6: Arsitektur **Tata Kelola & Manajemen SPBE**, **Penyelenggara SPBE**, Struktur, & SDM SPBE

Buku 7: **Prioritisasi, Peta Rencana SPBE, &**Perkiraan **Biaya Tiap Paket Kegiatan**

Silahkan Rekomendasi Arsitektur SPBE & Peta Rencana SPBE khususnya tahun 2021 diverifikasi terkait RKA OPD

Keselarasan Peta Rencana SPBE — Renja - RKA

PERENCANAAN (Plan)



✓ RPIMD

√Visi & Misi

✓ Program Unggulan Pimpinan Daerah

✓ Tupoksi & Renstra OPD



Arsitektur SPBE



Renja & RKA **OPD** terkait SPBE

PETA RENCANA SPBE

Rapat Renja & RKA, Rapat Koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE/Tim Anggaran & Dinkominfo/Unit TIK

PELAKSANAAN (Do)



Pembangunan/ **Pengembangan** & Operasional **SPBE**

EVALUASI (Check)

- Money SPBE. **Review** Arsitektur & Peta Rencana SPBE
- Laporan Indeks SPBE Kemenpan



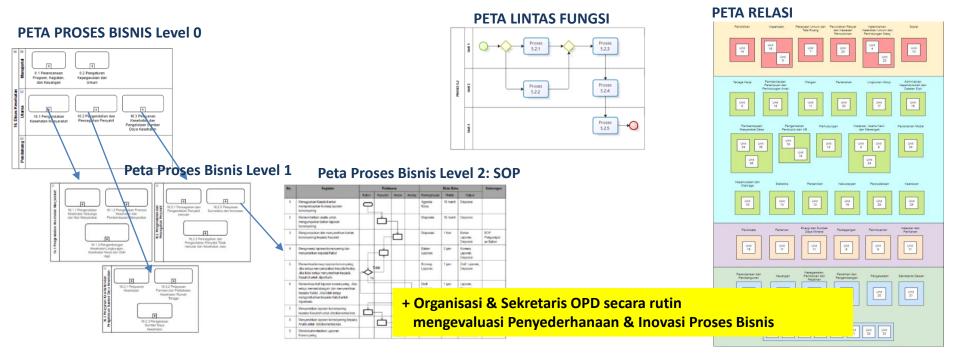
Pemantauan & **Evaluasi SPBE & Audit SPBE**

Update/Tindak Lanjut Perbaikan (Act)

PROSES BISNIS & Inovasi

Referensi: Perpres 95/2018 tentang SPBE

Permenpan-RB No. 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Permenpan-RB No. 35/2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah



Teknologi Informasi & Komunikasi

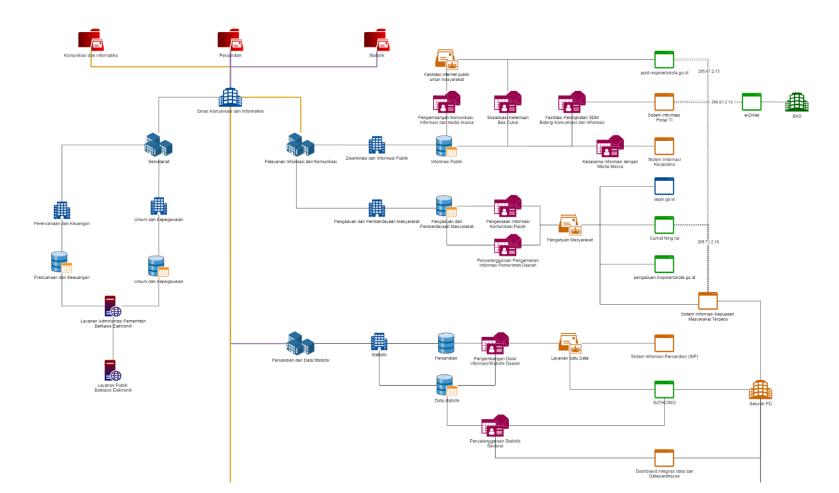


- 15. Buat **RENCANA APLIKASI** apa yang mau dibangun di setiap OPD setiap tahun, Setiap akan membangun APLIKASI, Rapat **Konsultasi/Koordinasi dengan DINKOMINFO!** Bangun Aplikasi sesuai Siklus SDLC. Evaluasi & Tindak-Lanjuti dengan **VERSI Baru!**
- 16. Terdapat **PUSAT DATA** (atau minimal RUANG SERVER Terpusat) dan telah **DIGUNAKAN SEMUA OPD** serta terdapat **PROSEDUR BAKU** Penggunaan Pusat Data, Terdapat **INTERKONEKSI** dengan Pusat Data Provinsi/Pusat/Daerah lain. Evaluasi & Tindak-Lanjuti rutin.
- 17. Bangun JARINGAN INTRA (FO atau Wireless radio) Mencakup SEMUA OPD, pastikan ada INTERKONEKSI dengan Jaringan Intra Provinsi/Pusat/Daerah lain. Evaluasi & Tindak-Lanjuti rutin.
- 18. Bangun API Gateway dan pastikan semua OPD dapat mengakses & memanfaatkan untuk layanan Integrasi Data. Bangun INTERKONEKSI dengan API Gateway (min. Web Service) Provinsi/Pusat/Daerah lain. Evaluasi & Tindak-Lanjuti rutin.

APLIKASI SPBE

- 1. Rekomendasi/Rencana **APLIKASI UMUM**minimal aplikasi pendukung 13 Layanan Administrasi Pemerintah & Layanan Publik
- Rekomendasi/Rencana APLIKASI KHUSUS
 khususnya aplikasi pendukung Layanan Publik Sektoral &
 Administrasi Pemerintah pendukung tupoksi/urusan masing-masing OPD
- 3. Rekomendasi/Rencana **Aplikasi** <u>Monitoring KPI</u> oleh Pimpinan Daerah & DPRD (contoh: Dashboard, SPK, SIG)
- 4. Diagram Hubungan antar APLIKASI, Kelompok INFORMASI, dan OPD Pengguna

Diagram Hubungan OPD, Bidang/Seksi, Program/Tupoksi, Data & Informasi, Aplikasi



Aturan & Implementasi Pembangunan APLIKASI SPBE

Setiap OPD yang akan membangun Aplikasi harus berkoordinasi dengan Dinkominfo:

- ✓ keselarasan dengan Peta Rencana SPBE tahun tersebut dan
- ✓ kewajiban Pengembang Aplikasi untuk menerapkan aktivitas System Development Life
 Cycle (SDLC) yakni Penggalian Kebutuhan Perancangan Pembangunan Pengujian –
 Dokumentasi (Desain, Source Code, Manual)

Aturan ini dimasukkan di Perwali/Perbup SPBE atau kebijakan lainnya.



Infrastruktur SPBE

- 1. Pusat Data:
- 2. Jaringan Intra Pemda
- 3. Sistem Penghubung Layanan

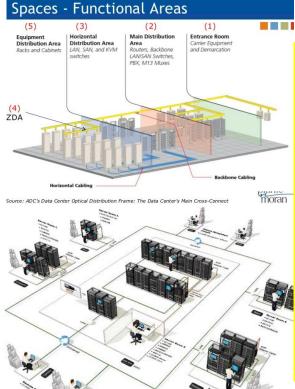
PUSAT DATA

adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.



Ruang Server

Standar Pusat Data

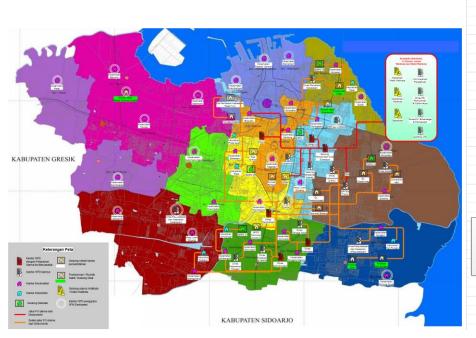


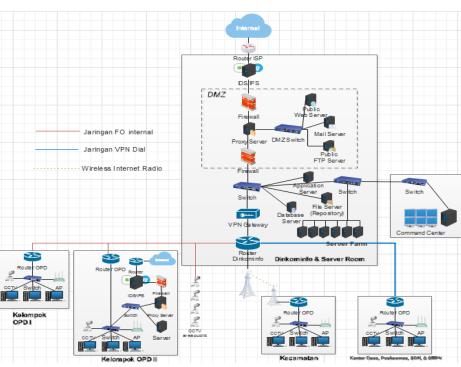
- ✓ Peningkatan
 Infrastruktur
 Room Server
 min. Pusat Data
 Tier 2
- ✓ Jaminan *Up- Time* &

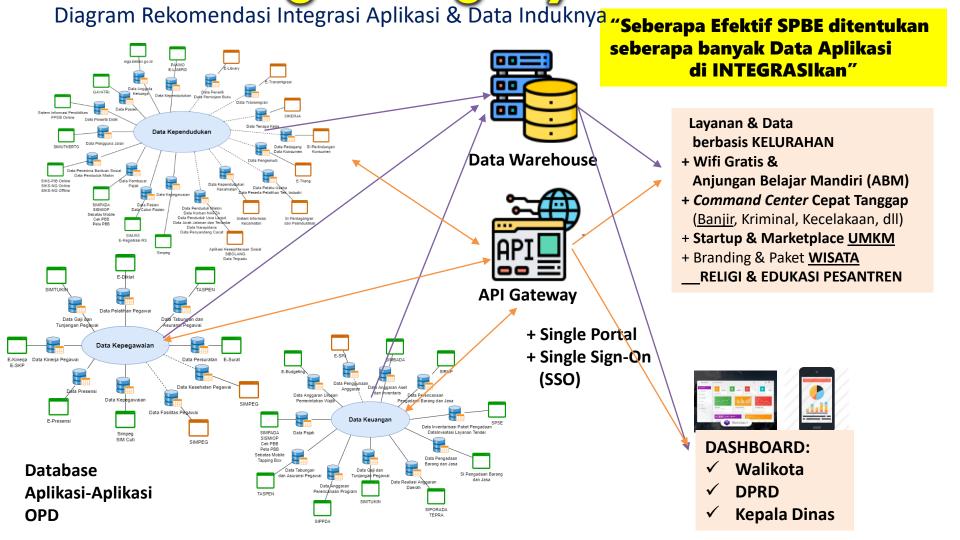
 Manajemen
 Pusat Data
 (Bukti: Juknis
 Pusat Data)
- ✓ Penempatan
 Server-Server
 OPD di Pusat
 Data (Bukti: Log
 OPD mengakses
 Pusat Data)

JARINGAN INTRA PEMERINTAH

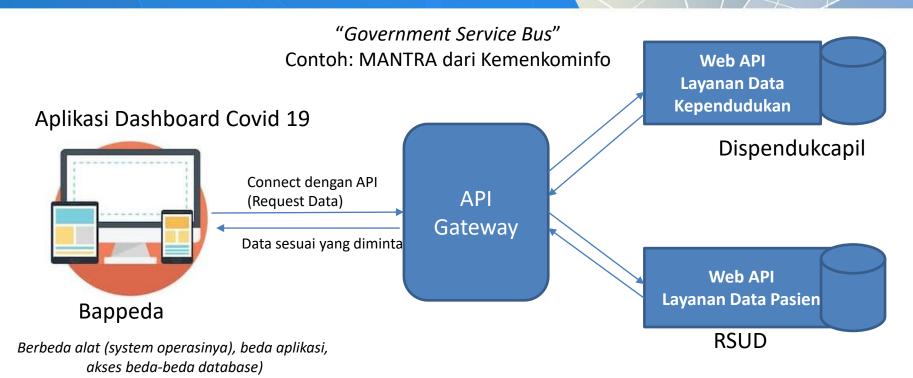
Rekomendasi jaringan WAN antar OPD 5 Tahun mendatang







API Gateway



Harus ada Kesepakatan Semantik (khususnya Sintaks)

Penyelenggara SPBE



- 19. Buat SK **TIM KOORDINASI SPBE** (Diketuai Kepala Daerah, Koordinator Sekda, Anggota: minimal ada Bappeko/da, Dinkominfo, Bagian Hukum, Inspektorat, Ortala, Keuangan). Harus ada **PROGRAM KERJA** dan **Laksanakan** sesuai rencana serta **diKOMUNIKASIkan ke semua OPD**. Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE & Tindak-Lanjuti rutin.
- 20. Setiap Penerapan inisiatif SPBE, **OPD melalui TIM KOORDINASI SPBE** dikoordinatori SEKDA melakukan **KOLABORASI dengan OPD-OPD terkait**. Evaluasi Kolaborasi SPBE & Tindak-Lanjuti rutin.



- ✓ Koordinator Sekda, Anggota termasuk Bappeda/ko, Dinkominfo, Hukum, Ortala, Keuangan, Inspektorat, BKD, ...
- ✓ Terdapat SK Pengangkatan dengan Tupoksi jelas
- ✓ Memiliki **Program tahunan**, **rapat rutin**, bukti **peran dalam koordinasi implementasi** Peta Rencana SPBE & Evaluasi SPBE level kota/kab

Tim Koordinasi SPBE

Manajemen SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Manajemen SPBE	
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	



Indikator 21 s/d 28

- 1. Manajemen Risiko = Permenpan 5/2020
- 2. Manajemen Keamanan Informasi = Indeks KAMI, ISO 27001, Peraturan BSSN 10/2019
- **3.** Manajemen Data = DAMA, Perpres 39/2019
- **4.** Manajemen Aset TIK = ITIL 4.0 "IT Asset Management"
- 5. Kompetensi Sumber Daya Manusia = ITIL 4.0 "Workforce & Talent Management", Peta Okupasi Nasional area fungsi TIK BNSP
- 6. Manajemen Pengetahuan = ITIL 4.0 "Knowledge Management"
- 7. Manajemen Perubahan = ITIL 4.0 "Change Control" & "Organization Change Management"
- 8. Manajemen Layanan SPBE = ITIL 4.0 "Service Desk",
 "Incident Management", "Problem Management",
 "Monitoring & Event Management",
 "Service Request Management"

Manajemen SPBE

Aspek 6 - Pelaksanaan Audit TIK		
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	



Indikator 29 s/d 30

Minimal 2 tahun sekali, lakukan AUDIT:

29. **Infrastruktur SPBE** = ISO/IEC 19770-1:2017

30. Audit **Aplikasi SPBE** = ISO 9001:2015, ISO/IEC/IEEE 90003:2018

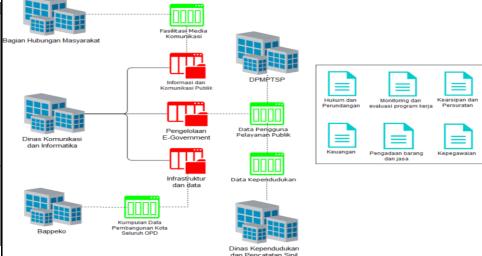
31. Audit **Keamanan SPBE** = Indeks KAMI, ISO 27001

usahakan dilaksanakan oleh **AUDITOR EKTERNAL bersertifikasi** (min. Auditor Internal). Dievaluasi & Ditindak-lanjuti rutin.

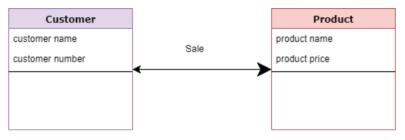
Arsitektur DATA & INFORMASI

- ✓ Tabel Daftar Data INPUT & Informasi OUTPUT setiap Layanan Publik, Administrasi Pemerintah, & Urusan (dari Tupoksi, Indikator RPJMD, Program Unggulan).
- ✓ Diagram hubungan <u>Kelompok Informasi</u> dengan <u>OPD</u> dan <u>antar</u> Kelompok Informasi.
- ✓ Data Model (tidak discover dalam project arsitektur SPBE)

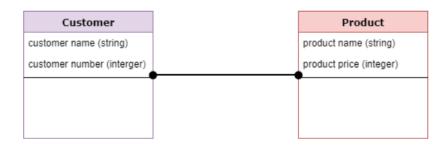
Urusan	Nama PD	Bagian/Bidang	Subbagian/Seksi	Program	Data	Informasi
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Seksi Diseminasi Informasi Publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Data rencana program dan kegiatan	Informasi publik
				Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Data koordinasi pelaksanaan	
				Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Data informasi publik	
				Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Data pemantauan dan evaluasi	
			Seksi Pengaduan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Data koordinasi pelaksanaan	Pengaduan dan pemberdayaan
				Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Data rencana program dan kegiatan Data rencana kebijakan	masyarakat



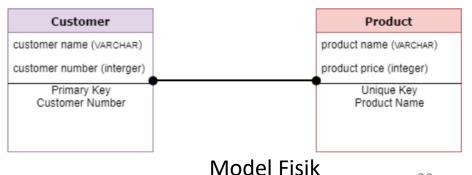
CONCEPTUAL, LOGICAL, & PHYSICAL Data Model?



Model Konseptual



Model Logika



30

Arsitektur Keamanan SPBE

adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE (Perpres 95/2018).

Mencakup <u>5 JAMINAN</u>:

- 1. **Kerahasiaan** (*Confidentiality*)
- 2. **Keutuhan** (Integrity)
- 3. **Ketersediaan** (Availability)
- 4. **Keaslian/Akurat** (authentication)
- 5. **Kenirsangkalan** (non-repudiation)

Berupa:

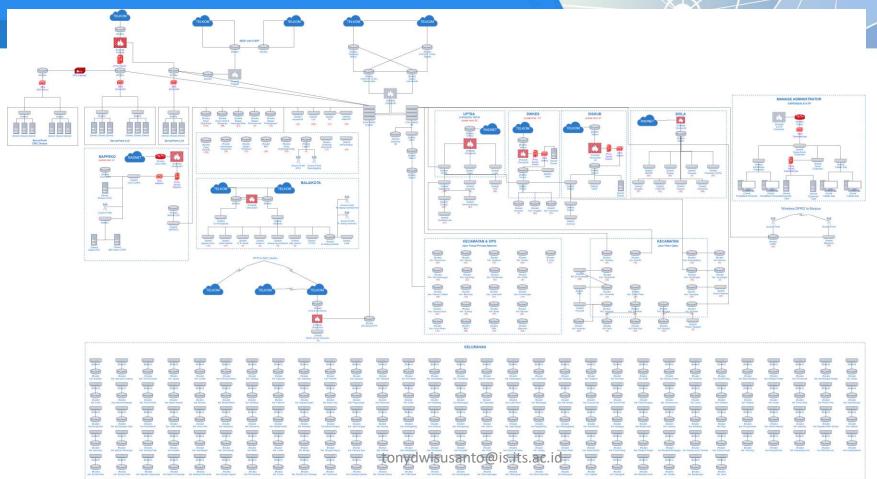
- ✓ Daftar kebutuhan **Layanan Keamanan Informasi**
- ✓ Diagram jaringan infrastruktur keamanan SPBE
- ✓ Tabel Daftar Kebutuhan Infrastruktur Keamanan Informasi (Hardware, Software)
- ✓ **Tabel daftar SOP & Prosedur** Keamanan Informasi
- ✓ Tabel daftar kebutuhan SDM & Kompetensi
 Keamanan Informasi: Eksisting vs. 5 tahun
 mendatang

Terhadap **3 OBYEK** sumber daya SPBE yang harus diamankan:

- a. data dan informasi (Peraturan BSSN 10/2019)
- b. Infrastruktur SPBE,
- c. Aplikasi SPBE.



Topologi Infrastruktur Jaringan Kota + Keamanan Informasi



Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Layanan SPBE		
Aspek 7 - Laya	Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan		
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran		
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan		
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian		
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis		
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah		
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi		
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai		
Aspek 8 - Laya	Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik		
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik		
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka		
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1		
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2		
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3		



Indikator 32 s/d 47

✓ Pastikan setiap indikator sudah ada APLIKASI yang sudah level INTEGRASI (jika ada Aplikasi Umum Pusat Lebih Baik, kecuali jika hanya level Komunikasi sebaiknya pake Aplikasi Lokal)





Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Internal Pemerintah)

Layanan

SPBE

Layanan Publik Berbasis Elektronik

(Layanan Eksternal ke masyarakat & bisnis)

- 1. Layanan **Perencanaan** (SIPD, Simda Perencanaan)
- 2. Layanan **Penganggaran** (SIPD, Simda Keuangan)
- 3. Layanan **Keuangan** (SIPD, Simda Keuangan)
- 4. Layanan **Pengadaan Barang & Jasa** (SPSE, Sirup)
- 5. Layanan **Kepegawaian** (Simda Gaji, Simpeg)
- 6. Layanan **Kearsipan** (SRIKANDI, SiMAYA)
- 7. Layanan **Pengelolaan Barang Milik Negara** (Simda BMD, Simbada)
- 8. Layanan **Pengawasan Internal terkait Pemerintah** (e-Inspektorat)
- 9. Layanan **Akuntabilitas Kinerja Organisasi** (e-Sakip)
- 10. Layanan **Kinerja Pegawai** (e-Kinerja)
- 1. Layanan **Pengaduan Layanan Publik** (SP4N-LAPOR)
- 2. Layanan **Data Terbuka** (Satudata.go.id)
- 3. Layanan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH)
- 4. Layanan **Publik Sektoral** (Pasal 44: sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya)

Arsitektur SPBE yang BAIK

adalah Dokumen Arsitektur SPBE yang:



(termasuk Metode Pembuatannya Benar)









